

## Vaksinasi Covid-19 Tahap Satu di Tangsel Baru 76 Persen

**TANGSEL (IM)**- Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap satu yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum mencapai target. Data Pemerintah Kota Tangsel menunjukkan, dari jumlah target sebanyak 8.901 orang, baru 6.783 orang yang divaksin.

“Secara kumulatif sampai dengan 22 Februari 2021 dari awal dari target 8.901 orang sudah divaksin 6.783 orang atau 76,2 persen,” ujar Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (23/2).

Menurut data yang dikantonginya, pada vaksinasi Covid-19 tahap satu dosis pertama telah mencapai hingga 103 persen. Sementara vaksinasi tahap satu dosis dua masih berjalan. Adapun vaksinasi tahap kedua yang rencananya akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret akan menasar orang-orang yang bekerja di pelayanan publik.

Sebelumnya, Sekretaris

is Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Alin Hendarin Mahdania menuturkan, vaksinasi bagi tenaga kesehatan lanjut usia (lansia) di Kota Tangerang Selatan juga sudah mulai dilakukan. Hal itu menyusul adanya instruksi bahwa vaksinasi Covid-19 yang tersedia di Indonesia juga boleh disuntikkan kepada masyarakat berusia di atas 60 tahun.

“Sudah mulai (vaksinasi nakes lansia) dari tanggal 8 Februari 2021. Data manual ada di faskes masing-masing karena nakes lansia langsung datang ke faskes. Laporan ke Dinkes saat ini masih kumulatif pemakaian dosis vaksin,” tutur dia.

Diketahui, kegiatan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Kota Tangerang Selatan berlangsung mulai 15 Januari 2021. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di sebanyak 167 faskes meliputi 28 rumah sakit, 47 klinik, 63 praktik mandiri, dan 29 puskesmas atau PKM di Kota Tangsel. ● **PP**

## 195 Guru Honorer di Tangsel Akhirnya Dilantik Jadi PPPK

**TANGSEL (IM)**- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akhirnya melantik 195 guru honorer kategori dua atau K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru tersebut baru dilantik setelah menunggu lebih dari dua tahun usai dinyatakan lulus tes pengangkatan PPPK pada 2018 silam.

“Kriterianya, seluruh guru K2 melakukan tes yang dilakukan tahun 2018 lalu. Lalu yang lulus menjadi salah satu daftar, list untuk menjadi PPPK,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan, Taryono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Sementara itu, Kepala

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Apendi menjelaskan, para guru PPPK itu akan dikontrak kerja selama lima tahun ke depan. Namun, evaluasi tahunan tetap akan dilakukan untuk menilai kinerja para guru PPPK tersebut. “Evaluasi setiap tahun untuk ditentukan apakah kontraknya akan diteruskan atau tidak,” ungkapnya. Apendi mengklaim, program pengangkatan itu menjadi solusi untuk pegawai non-PNS agar bisa mendapat fasilitas yang hampir setara dengan PNS. “Sesuai dengan ketentuan, salah satu fasilitasnya adalah gaji bulanan yang sama dengan PNS,” kata Apendi. ● **pp**

IDN/ANTARA



PETANI PADI DAN PALAWIJA BERALIH MENANAM PORANG

Petani merawat tanaman porang (*Amorphophallus muelleri*) di Desa Ngadimulyo, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (23/2). Sejumlah petani padi dan palawija di kawasan tersebut beralih menanam porang karena mempunyai nilai ekonomi tinggi yaitu dalam satu hektare lahan bisa menghasilkan 80 ton porang dengan harga jual Rp10 ribu - Rp13 ribu per kilogram.

## Jelang Pelantikan, Pemkot Solo Siapkan Ajudan untuk Gibran

**SOLO (IM)**- Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka dan wakilnya Teguh Prakosa, akan dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara virtual, pada Jumat (26/2). Sejumlah persiapan telah dilakukan Pemkot Solo, termasuk menyiapkan ajudan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

“Ajudan sudah kita siapkan dari sini (pemkot),” ujar Pelaksana Harian Wali Kota Solo, Ahyani, Selasa (23/2). Menurut Sekda Kota Solo ini, ajudan itu mulai mendampingi Gibran sesuai dilantik sebagai Wali Kota Solo.

Mengenai persiapan pelantikan, Ahyani mengaku sudah berkomunikasi dengan Gibran, termasuk mengenai busana yang akan dikenakan Gibran dan Teguh saat pelantikan di Balai Tawangarum, Balai Kota nanti. “Sudah komunikasikan semuanya. Nanti yang akan melantik Gubernur Jateng secara virtual,” terangnya.

Terkait pengamanan setelah dilantik, Ahyani me-

nyebut, tidak tertutup kemungkinan Gibran akan tetap mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), baik secara tertutup maupun terbuka.

“Untuk pengamanan nanti setelah dilantik, semua tergantung beliau. Kalau di sini kan wilayahnya pemkot. Kalau di pribadi wilayahnya RI 1. Sebagai wali kota wilayahnya pemkot, mengikuti protokol pemkot. Tapi kalau nanti ada pengamanan tertutup juga bisa,” pungkas Ahyani.

Pasangan Gibran-Teguh yang diusung PDIP dan disokong mayoritas partai lainnya memenangkan Pilkada Solo 2020. Mereka berhasil meraup kemenangan 86,53 persen atas lawannya, pasangan independen Bagyo Wahyono - FX Supardjo (Bajo). Gibran-Teguh akan menggantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo yang purnatugas 17 Februari lalu. ● **pra**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## PERGERAKAN TANAH RUSAK LIMA RUMAH DI TASIKMALAYA

Seorang warga menunjukkan rumah yang rusak dan dikosongkan penghuninya akibat pergerakan tanah di Kampung Cigorowong, Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (23/2). Sedikitnya lima rumah warga rusak akibat pergerakan tanah dan mengancam 20 rumah lainnya.

## Ade Yasin Ajak Masyarakat Ikut Sukseskan Pendataan Keluarga

Data itu sangat penting dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga. Oleh karenanya setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

**BOGOR (IM)**- Bupati Bogor, Ade Yasin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk sukseskan pendataan keluarga. Digelar pada tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021 di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Menurutnya, data itu sangat penting dalam perencanaan

pembangunan termasuk data keluarga. Oleh karenanya setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Ayo sambut petugas pendataan yang akan datang ke rumah anda dengan senyuman yang



ramah. Berikan data yang benar, akurat dan jelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5 M,” ujar Ade, kemarin.

Ditegaskan Ade Yasin, pendataan awal perencanaan keluarga, pastikan keluarga

kita terdapat untuk Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadilan.

Pentingnya, pendataan keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga

Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KK-BPK) diperlukan Data dan Informasi Keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA). ● **gio**

## Pemkab Bogor Libatkan SMK Bangkitkan Geliat Ekonomi

**CIBINONG (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat segera melibatkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam membangkitkan geliat ekonomi dari imbas pandemi Covid-19 di daerah itu.

“Siswa SMK akan dilibatkan dalam memasarkan produk UMKM, kuliner ataupun po-

tensi wisata di Bogor lewat media sosial,” ungkap Ketua Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar alias Gus Udin di Cibinong, Bogor, Selasa (23/2).

Dosen Ilmu Politik Universitas Djuanda Bogor itu, mengaku telah berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Barat

agar kegiatan tersebut menjadi tugas pembelajaran jarak jauh (PJJ) para siswa selama pandemi.

la mengatakan nantinya para siswa SMK dituntut membuat desain grafis dan konten video yang berisi informasi seputar kuliner, lokasi pariwisata, ataupun produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kabupaten Bogor.

“Konten-konten karya siswa SMK ini nanti diunggah ke media sosial kemudian disertakan ‘hashtag’ (tanda pagar) yang disepakati nanti,” terangnya.

Gus Udin optimistis bahwa pelibatan siswa SMK tersebut menjadi sarana pemulihan ekonomi yang efektif tanpa pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk promosi.

Pasalnya, Pemkab Bogor memiliki sejumlah tantangan dalam melakukan pemulihan ekonomi, yaitu bertambahnya jumlah penduduk miskin yang diperkirakan mencapai 2,6 persen, meningkatnya angka pengangguran pada 2020 yang diprediksi mencapai 12,97 persen, meningkat 3,91 persen dari 2019 yang 9,06 persen. ● **gio**

## Polisi Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Pembuangan Limbah APD

**BOGOR (IM)**- Polres Bogor kembali mengamankan 4 tersangka baru dalam kasus pembuangan limbah APD di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempat tersangka itu berasal dari pihak hotel dan laundry.

“Untuk kasus limbah APD ada penambahan 4 tersangka. Dari pihak laundry 2 orang dan pihak GM sama HRD hotel 2 orang,” kata Kapolres Bogor, AKBP Harun, di Mapolres Bogor, Selasa (23/2).

Mereka berperan sebagai penandatangan MoU atau perjanjian soal pembuangan limbah APD dari hotel isolasi pasien covid-19 dengan pihak laundry.

“Dari pihak laundry dia yang menandatangani MoU kerjasama dengan hotel, 1 lagi pendampingnya yang di laundry. Dari pihak hotel, 1 yang menandatangani MoU yaitu HRD dan GM yang menyuruh melakukan HRD untuk pelaksanaan MoU,” jelas Harun.

Motifnya, tambah Harun,

pihak hotel dengan laundry melakukan kerjasama membuang limbah APD untuk menekan tingginya biaya dibandingkan menggunakan jasa pengelola limbah yang mencapai Rp10 juta.

“Cost yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah awalnya kerjasama dengan PT AP tinggi Rp 10 jutaan. Kemudian mereka bekerjasama dengan laundry ini sehingga costnya bisa ditekan hanya Rp 1 juta per pengambilan dengan 2 box kendaraan,” bebernya.

Dengan begitu, total tersangka dalam kasus pembuangan ini sebanyak 6 orang. Penyidik masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada saksi lain yang akan diperiksa.

“Ini tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan kita periksa. Karena ini sementara masih berjalan proses penyidikannya,” tutup Harun.

Seperti diketahui, Polres Bogor telah membekuk dua tersangka dalam kasus pembuangan limbah APD di wilayah Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Limbah tersebut rupanya dari salah satu hotel tempat isolasi pasien covid-19 di Tangerang initial PPH.

Modusnya, pihak hotel secara ilegal bekerjasama dengan pihak laundry di tempatnya untuk membuang sampah medis tersebut. Hal itu sengaja dilakukan dengan dalih penghematan biaya pengolahan limbah.

Kedua tersangka yang telah diamankan merupakan sopir dari pihak laundry yang membuang sampah medis sembarangan di wilayah Tenjo dan Cigudeg. Tersangka dijerat Pasal 40 Ayat 1 UU No18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 104 Jo No 60 dan UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ● **gio**

## Kab. Bogor Perpanjang PPKM Berbasis Mikro hingga 8 Maret

**CIBINONG (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro hingga 8 Maret 2021.

“Kami memperpanjang pembatasan sosial berskala besar melalui PPKM berbasis mikro,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Selasa (23/2).

Menurut dia, perpanjangan berdasarkan Keputusan Bupati (Kepbup) Nomor 443/174/Kpts/Per-UU/2021 itu berlaku mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021, setelah penerapan pertama pada 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa aturan yang diterapkan tetap serupa dengan PPKM jilid pertama, yakni berisi sembilan poin. Pertama, membatasi tempat dengan menetapkan bekerja dari rumah atau “work from home” (WFH) sebanyak 50 persen. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

Ketiga, sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan dan lain-lain yang terkait kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan. Keempat, kegiatan restoran layanan makan di tempat hanya dibolehkan 50 persen dari kapasitas. Kemudian layanan pesan antar diizinkan sesuai jam operasional restoran.

Kelima, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan sampai pukul 21.00 WIB. Keenam, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan. Ketujuh, tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas 50 persen.

Kedelapan, kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kesembilan, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum sebanyak 50 persen. ● **gio**

## Tempat Hiburan di Bandung Sering Langgar Jam Operasional

**BANDUNG (IM)**- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengatakan tempat hiburan malam masih sering melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tentang jam operasional. Berdasarkan data, tempat hiburan malam yang ditindak sejak Januari hingga Februari mencapai 127.

“Tempat hiburan selalu melanggar jam operasional,” ujar Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Bandung, Agus Priono kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Selasa (23/2).

la mengungkapkan, pihaknya sempat memberikan usulan kepada satgas agar operasional tempat hiburan malam berlaku dari pukul 20.00 WIB hingga 24.00 WIB.

“Tempat hiburan pasti melanggar jam operasional maupun protokol kesehatan lainnya,” kata dia. Ia melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan operasi yustisi terhadap tempat hiburan malam.

Selain itu, bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk melaksanakan rapid tes antigen agar memastikan kondisi penyebaran Covid-19 di tempat hiburan malam.

Pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung melansir hingga Senin (22/2) kemarin, jumlah kasus positif Covid-19 kumulatif mencapai 11.725 kasus, 1.055 kasus aktif, 10.437 kasus meninggal dunia dan 233 kasus meninggal dunia. ● **pur**



IDN/ANTARA

## OMZET UMKM DI JABAR BERKURANG SAAT PANDEMI

Perajin membuat miniatur pesawat terbang di Padasuka, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (23/2). Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat menyebutkan omzet sekitar 4,6 juta pelaku UMKM di Jawa Barat berkurang drastis hingga 80 persen saat pandemi COVID-19 akibat dari daya beli masyarakat yang menurun.